

**PERANAN UNIT PENGELOLA SOSIAL
PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
(Studi di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)**

S K R I P S I

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Disusun Oleh :

**I K S A N
NIM. 05230045**

Dosen Pembimbing

**PAJAR HATMA. IJ, M.Si
NIP. 1981 0428 2003121 003**

**FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Pajar Hatma. Ij, M.Si
Dosen Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Iksan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
D.I.Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan secukupnya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

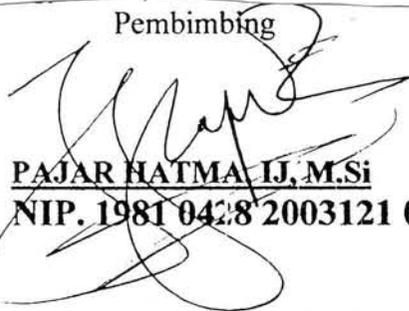
Nama : I K S A N
NIM : 05230045
Kosentrasi : Pengembangan Masyarakat
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : DAKWAH
Judul Skripsi : Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan
dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia (Studi di Desa
Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)

Sudah dapat di munaqasyahkan dalam sidang dewan munaqasyah Fakultas Dakwah, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2010

Pembimbing


PAJAR HATMA IJ, M.Si
NIP. 1981 04 28 2003121 003



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/ 1113/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERANAN UNIT PENGELOLA SOSIAL PNPM MANDIRI
DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(Studi di Desa Potorono Kec. Banguntapan Kab. Bantul)**

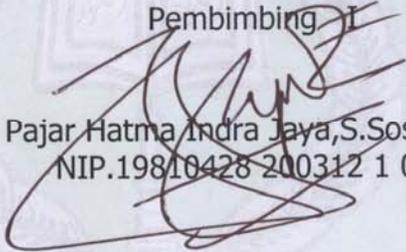
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iksan
NIM : 05230045
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 14 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : **A/B (delapan puluh enam koma enam tujuh)**

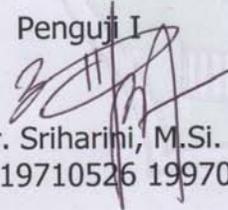
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

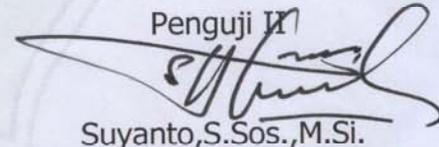
Pembimbing I


Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP.19810428 200312 1 003

Penguji I


Dr. Sriharini, M.Si.
NIP. 19710526 199703 2 003

Penguji II


Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660531 198801 1 001

Yogyakarta, 19 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia** (Strudi di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta) ini cukup lama.

Dalam menulis skripsi ini penulis juga banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun dalam penulisan. Untuk itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada :

Yang Terhormat

1. Prof. Dr. H. M Bahri Ghazali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Aziz Muslim, M.P.d, selaku ketua jurusan PMI yang telah memberikan izin penelitian ini.
3. Bapak Pajar Hatma. Ij, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Seluruh staf pengajar maupun staf administrasi di Fakultas Dakwah yang banyak memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan sampai penyelesaian penelitian.
5. Seluruh Staf Kantor sekretariat Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian
6. Seluruh Tim Faskel PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Bantul Pos Wilayah 4 yang telah membantu proses penelitian di Desa Potorono.

7. Bapak Lurah Desa Potorono maupun Staf pemerintah Desa Potorono yang telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian ini.
8. Anggota LKM Maju Sejahtera Desa Potorono yang selalu mendampingi dan memberikan informasi setiap saat selama proses penelitian, khususnya pengurus Unit Pengelola Sosial LKM Maju Sejahtera Desa Potorono yang ramah dalam membantu pengumpulan data
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis dalam penyusunan laporan penelitian menyadari adanya kekurangan, walaupun penulis telah mengerjakan dengan segala usaha dan upaya. Maka saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penyusun mengharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi LKM Maju Sejahtera Desa Potorono serta sebagai tambahan referensi di perpustakaan jurusan PMI.

Yogyakarta, 14 Juli 2010

Penulis

I K S A N

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
SURAT PERNYATAAN.....	II
NOTA DINAS.....	III
PENGESAHAN.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
MOTO.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
ABSTRAKSI.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Metode Penelitian	24

BAB II GAMBARAN UMUM DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

A. Letak Desa Potorono	29
B. Mengenal Kondisi Alam	29
C. Sarana Dan Prasarana.....	31
D. Lembaga-Lembaga Desa.....	34

BAB III PROBLEM MASYARAKAT DI DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

A. Masalah Kemiskinan.....	43
B. Masalah Sumberdaya Manusia	47
C. Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan.....	49
D. Analisa Alternatif Strategi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	49
E. Masalah Pengagguran.....	49
F. Potensi Sumberdaya Manusia.....	53

BAB IV PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL DI DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah PNPM Mandiri Perkotaan di Potorono.....	57
B. Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di Potorono.....	58
C. Tahapan Pra-Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Potorono.....	60
D. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Potorono.....	73

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM UNIT PENGELOLA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

A. Peran Unit Pengelola Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan.....	84
B. Pelaksanaan Program Unit Pengelola Sosial.....	85
1. Pelatihan Menjahit.....	85
2. Pelatihan Pembuatan Kue/Roti.....	89
3. Dampaknya Terhadap Program Pelatihan Ketrampilan	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran, Kritikan dan Masukan.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DAN CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL, BAGAN DAN FOTO

Tabel I Sejarah Alokasi dana Kegiatan PNPM Desa Potorono.....	58
Tabel 2 Distribusi Alokasi dana BLM di Kelurahan Lama.....	74
Tabel 3 Dana Unit Pelaksanaan Lingkungan Desa Potorono Tahun 2008.....	76
Tabel 4 Alokasi AnggaranUPK Ekonomi Bergulir.....	79
Tabel 5 Kegiatan dan Alokasi Anggaran Unit Pengelola Sosial Desa Potorono.....	81
Bagan 1 Proses pelaksanaan PNPM.....	61
Foto 1 Keadaan jalan disalah satu wलयah Desa Potorono.....	32
Foto 2 Salah satu foto masjid Al-Muttaqin di daerah Salakan, Desa Potorono.....	33
Foto 3 Foto irigasi pengairan pertanian daerah Nglaren Desa Potorono.....	33
Foto 4 Hasil pemotretan pada petani peternakan.....	34
Foto 5 Pelaksanaan Review PJM Pronangkis Desa bersama anggota LKM-MS dan tokoh masyarakat.....	46
Foto 6 Peran masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.....	56
Foto 7 Diskusi dengan kelompok warga terhadap permasalahan kemiskinan.....	62
Foto 8 Rapat diskusi dan penjelasan masalah pemetaan swadaya masyarakat.....	65
Foto 9 Suasana rapat anggota LKM-MS yang di adakan setiap 2 bulan sekali.....	68
Foto 10 Gotong Royong Membangun Jalan bantuan PNPM-Mandiri.....	78
Foto 11 Proses pelaksanaan kegiatan UPS di masyarakat.....	82
Foto 12 Pelaksanaan kegiatan UPS kepada para peserta kegiatan.....	83
Foto 13, 14 Hasil kinerja UPS terhadap pelatihan	90

ABSTRAKSI

Oleh :

I K S A N
05230045

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2010. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan dan dampak kegiatan UPS untuk peningkatan SDM masyarakat Desa Potorono. Penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan di Desa Potorono dengan memperoleh beberapa info seputar kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Sosial. Adapun kerangka teoritik yang digunakan adalah peran pekerja sosial dalam meningkatkan sumberdaya manusia.

Dari hasil penelitian ini masyarakat yang menerima program dari Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang berupa pelatihan-pelatihan menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Potorono khususnya masyarakat miskin yang menerima program. Kegiatan tersebut sebagian dapat meningkatkan efektifitas di masyarakat dengan mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan dapat sebagai tambahan penghasilan keluarga, namun secara umum kegiatan yang dilakukan Unit Pengelola Sosial tidak dapat menggantikan pekerjaan mereka sebagai suatu pekerjaan yang pokok. Hal ini terbukti dengan adanya wawancara akhir yang dilakukan peneliti di lapangan, bahwa peserta yang memperoleh pelatihan-pelatihan tersebut tidak dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Meskipun mendapat alat dan bantuan modal mereka hanya menggunakan sementara saja sebatas formalitas supaya mendapat bantuan. Peserta juga tidak ada tanda-tanda untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan yang mereka lakukan hanya menunggu orang yang mau datang kepada mereka untuk pemesanan, jika tidak ada pemesanan mereka juga hanya nganggur saja di rumah tidak bekerja dan tidak ada usaha yang lain.

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.**

untuk menghindarkan kemungkinan banyaknya interpretasi dan salah tafsir terhadap maksud judul tersebut, maka cukup penting bagi penulis untuk memberikan penegasan terhadap istilah-istilah pada judul skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Peranan

Peranan berasal dari kata “*peran*” kemudian mendapat akhiran “-*an*”. Peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya suatu peristiwa.¹ Menurut Soerjono Soekanto peranan diartikan sebagai suatu perilaku individu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial.² Sedangkan menurut Gross, Masson dan McEachhern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³ Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, maka penyusun memahami bahwa peranan merupakan suatu proses perilaku aktif seseorang atau lembaga terkait untuk melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan harapan.

¹ W.J.S Poerwadarminta *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta. P.N Balai Pustaka. 1985). hlm. 141.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. U.I. 1996.Hlm. 1037

³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1984). hlm.99.

2. Unit Pengelola Sosial PNPM-Mandiri

PNPM-Mandiri merupakan program nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat, dengan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan. PNPM-Mandiri merupakan program pembaruan dari dua program yang lama yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK), serta Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini berubah dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan (PNPM-PPK). Sedangkan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dari dua program PNPM tersebut penulis mengambil fokus pada PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini karena peneliti sering membantu pelaksanaan dengan Program PNPM Mandiri Perkotaan.

Sedangkan Unit Pengelola Sosial merupakan unit yang dijalankan oleh seorang pekerja sosial menangani masalah kegiatan seperti kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan khusus. Selain Unit Pengelola Sosial (UPS) di PNPM masih ada beberapa Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu unit yang menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dari pihak lainnya yang bersifat hibah. Selanjutnya Unit Pengelola Lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan tugas kebijakan yang

menyangkut kegiatan di bidang pembangunan lingkungan, pemukiman, penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan, serta tata kelola yang baik (“*good governance*”) di bidang pemukiman. Ketiga unit tersebut dibentuk dan dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).⁴Dari ketiga unit tersebut penulis fokus pada unit pengelola sosialnya.

3. Pengembangan Sumbardaya Manusia

Konsep ini terdiri dari dua kata yaitu pe- dan -an, secara Etimologis kata pengembangan berasal dari kata “*kembang*” yang berarti bertambah maju, menjadi besar, kemudian mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” menjadi pengembangan yang berarti memajukan, menyempurnakan. sedangkan menurut istilah pengembangan bisa diartikan sebagai cara, proses, atau perbuatan mengembangkan.⁵ Sehingga pengembangan diartikan sebagai cara atau proses sehingga membuat satu kemajuan.

Pengembangan menurut H.M. Ya’kup mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Komponen ini mencakup tiga aktivitas penting, yaitu *pertama*, membebaskan dan menyadarkan masyarakat, *kedua*, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang *ketiga*, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya

⁴ Marnia Nes. *Konsep PNPM-MP*, Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya). hlm.11.

⁵ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : English, 1991). hlm.1693.

masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.⁶

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif agar mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung pada alam sekitarnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari SDM lebih di mengerti sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial yang membentuk suatu pola kehidupan sosial yang dinamis, untuk itu pentingnya menciptakan SDM yang mampu menjawab problematika sosial perlu terus di upayakan agar keselarasan dapat terwujud.⁷

Jadi yang di maksud dalam judul penelitian Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta yaitu proses kegiatan aktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, partisipasi serta etos swadaya masyarakat agar mampu melakukan serangkaian upaya memperbaiki sumberdaya manusia ketingkat yang lebih layak.

4. Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

⁶ Aziz Muslim, "Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 5:1 (Yogyakarta : Jurusan PMI, Januari 2007), hlm.20.

. [Http://LP3IMTC.Com/Seputar-Materi-Training/Pengertian-Sumber-Daya-Manusia.html](http://LP3IMTC.Com/Seputar-Materi-Training/Pengertian-Sumber-Daya-Manusia.html)

Desa Potorono merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banguntapan yang mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan dari pemerintah pusat. Untuk menghindari salah penafsiran atau interpretasi dari penegasan judul adalah peran seorang pekerja sosial di dalam Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam pengembangan sumberdaya manusiadi Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang masih di hadapi bangsa Indonesia. Hal itu yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dimana terdapat 34,96 juta jiwa atau 15,42% dari jumlah penduduk di Indonesia.⁸ Telah banyak gagasan dan usaha untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Sebenarnya sudah ada yang menangani mulai dari lembaga-lembaga bisnis, lembaga sosial, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang lainnya. Sekarang ini banyak sekali lembaga bisnis yang membawa nilai-nilai sosial untuk mengangkat “*image*” lembaganya di mata publik.⁹

Di dunia bisnis kini perusahaan-perusahaan berlomba-lomba melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu semacam program kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang mempunyai program tersebut yang sifatnya sukarela dan bukan bertujuan komersil dengan

⁸ Perkembangan jumlah penduduk miskin yang ditetapkan oleh BPS pada bulan maret 2008 BPS (*Badan Pusat Statistik*).

⁹ Marnia Nes. *Konsep PNPM-MP*, Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya). hlm.12 dan 13.

menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan.¹⁰ Di Lembaga sosial seperti LSM pada umumnya lebih menekankan pada menjual gagasan untuk perubahan dalam proses pembangunan menjalankan gagasannya. Lembaga ini tidak berjalan sendirian akan tetapi bekerja berdasarkan isu-isu khusus seperti memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun perencanaan serta membantu masalah persoalan lingkungan hidup, kesehatan, hukum, pendidikan. Dalam perguruan tinggi juga mempunyai tanggung jawab sosial yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk penelitian dan program untuk pemberdayaan masyarakat, pada umumnya lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Bentuk kerja sama yang bisa didapatkan berupa bimbingan teknis untuk pembuatan proposal kegiatan kepada pihak lain, meningkatkan ketrampilan pengetahuan sesuai dengan bidang pendidikannya.¹¹

Maka untuk mensinergitaskan pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri mulai tahun 2007. Melalui program tersebut dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial tersebut dibuktikan dengan membuat program riil pada masyarakat arus bawah, dengan program sub unit PNPM Mandiri Perkotaan-nya yaitu Unit Pengelola Sosial , Unit Pengelola Lingkungan, serta Unit Pengelola Keuangan. Unit Pengelola

¹⁰ Meylani Yo, *Penerapan Pendekatan Sistem Dalam Relasi Tanggung Jawab Sosial Korporat Dengan Stakeholders di Indonesia, Makalah Dalam Seminar.*” Dirkursus Relasi Masyarakat, Bisnis dan Media” Dalam Rangka Dies Natalis Fisip UAJY XVI, 8 Juni 2007,. hlm.3.

¹¹ Marnia Nes. *Konsep PNPM-MP*, Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya). hlm.12 dan 13.

Sosial merupakan unit yang menyangkut kegiatan di bidang sosial, seperti kesehatan, pendidikan, ketrampilan khusus dan yang lain, kemudian Unit Pengelola Keuangan salah satu unit yang menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dari pihak lainnya yang bersifat hibah.¹²

Secara struktural Unit Pengelola Sosial yang diharapkan mampu menyentuh secara langsung dan memberi solusi secara tepat pada masyarakat, utamanya permasalahan sosial, namun persoalan yang dihadapi di lapangan tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang ada dalam teorinya. Pendekatan melalui Unit Pengelola Sosial yang sangat mungkin menimbulkan persoalan-persoalan dimasyarakat karena kompleksitas persoalan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat serta kondisi dan situasi yang tentunya berbeda antar masyarakat. Maka akan beda pula pola implementasi program tersebut di lapangan.

Hal yang menarik penulis untuk meneliti mengenai Peran Unit Pengelola Sosial karena unit ini pada akhirnya akan dapat mempengaruhi unit-unit yang lain seperti Unit Pengelola Lingkungan dan Unit Pengelola Keuangan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan serta dapat berperan aktif dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari konsep program tersebut. Sasaran dari penelitian ini adalah membahas tentang Unit Pengelola Sosial secara langsung dalam program penanggulangan masalah sosial yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul melalui program PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaannya di Desa Potorono.

¹² Marnia Nes. *Konsep PNPM-MP*, Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya). hlm.12 dan 13.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan istilah dan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan persoalan-persoalan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono?
2. Apa dampak Unit Pengelola Sosial dalam mengatasi persoalan pengangguran di masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan yang dilakukan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono.
2. Mengetahui hasil yang dicapai oleh Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan, terkait masalah sumberdaya manusia serta persoalan sosial di Desa Potorono.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini sudah dilakukan untuk memberikan tambahan referensi mengenai penyelesaian problem sosial bagi seorang pengembang masyarakat, terutama pada bidang study peranan. Selain itu dari studi ini dapat memberikan stimulan terbentuknya dialektika wacana kritis, sehingga tercipta pemahaman yang mendalam mengenai pengembangan masyarakat yang partisipatoris, progresif, dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Secara internal kelembagaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif secara obyektif bagi pemerintah Desa

Potorono. Khususnya dalam mengevaluasi adanya program PNPM Mandiri Perkotaan yang diterapkan di Desa Potorono terhadap tingkat keberhasilan pada Unit Pengelola Sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia terkait masalah sosial yang ada artinya apabila program ini mampu mengurangi masalah sosial, maka untuk langkah selanjutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Apabila yang terjadi justru sebaliknya maka harus dilakukan peninjauan ulang terkait kelemahan yang terjadi serta memperbaikinya secara tepat agar cita-cita kemandirian masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan pada program sebelumnya.

Dengan melihat konsep penerapan serta hasil yang dicapai dari Unit Pengelola Sosial program PNPM Mandiri Perkotaan, peneliti berharap hasil ini mampu memberikan masukan dan memberikan data bagi penelitian selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan penelusuran yang membahas tentang masalah sosial, sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian yang secara khusus memfokuskan pada masalah sosial. Masalah sosial juga bisa menyebabkan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan masih relatif sedikit yaitu skripsi yang ditulis oleh Syukron Munjazi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan).¹³ Skripsi ini membahas masalah partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan persoalan kemiskinan dan bukan mengurangi kemiskinan.

Ade Jalil Hermawan yang berjudul Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Atas Pemikiran KH. MA. Sahal mahfudz), membahas tentang dakwah

¹³ Sukron Munjazi, Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan), Skripsi Fakultas Dakwah 2009.

kaitannya dengan konsep pengentasan kemiskinan yang hasilnya adalah pemberdayaan dan pengembangan eksistensi dakwah dalam kaitannya dengan perbaikan hidup masyarakat miskin dan terbelakang. Selain itu memberikan gambaran tentang gagasan KH. MA. Sahal Mahfudz, mengenai dakwah dengan model partisipatif atau keteladanan yang memberikan motivasi pada sasaran agar dapat membangun.¹⁴ Skripsi ini membahas masalah persoalan sosial dari kesadaran manusia itu sendiri terhadap persoalan sosial melalui kerohanian keagamaan. Ketiga yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ade Zulkhan Suparman, berupa skripsi jurusan PMI yang berjudul “Peran badan usaha kredit pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Penelitian tersebut berhasil mengungkap peranan badan usaha desa dalam memberikan solusi kemiskinan dengan melalui pemberian kredit, penggalangan dana masyarakat berupa tabungan, serta pendampingan konsultan kewirausahaan yang dilakukan secara sepihak.¹⁵ Usaha masyarakat tersebut bisa dikatakan berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan akan tetapi perlu adanya sinergisitas terhadap program-program lain yang berhubungan dengan persoalan kemiskinan maupun persoalan sosial di masyarakat.

Yang keempat yaitu langkah pengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial yang bertumpu pada sektor ekonomi saja lebih jauh persoalan sosial itu sangat kompleks, dan dalam kesimpulannya bahwa proyek-proyek yang digulirkan untuk mengatasi persoalan sosial sebaiknya tidak hanya pada sektor

¹⁴Ade Jalil Hermawan, *Dakwah dan pengentasan kemiskinan* (Studi atas pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz), Skripsi Fakultas Dakwah 2001 (tidak diterbitkan)

¹⁵ Ade Zulkhan Suparman, *Peran badan usaha kredit pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi fakultas dakwah 2007 (tidak diterbitkan)

ekonomi saja, sebab persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan ekonomi atau bantuan finansial melainkan yang lebih utama adalah pengembangan sumberdaya manusianya agar mereka dapat mandiri.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran program Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang fokusnya pada pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono dengan tujuan untuk mengurangi masalah sosial yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung peranan masyarakat dalam mengawal program, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi, terutama di Desa Potorono, Jadi penelitian tersebut belum pernah dibahas oleh penyusun lain.

G. KERANGKA TEORITIK

1. Peranan Pekerja Sosial

A. Definisi pekerja sosial

Pekerja sosial adalah kegiatan dalam menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitasnya agar berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁶ Menurut IFSW (*Internasional Federation Of Sosial Workers*) dijelaskan bahwa pekerja sosial adalah pekerjaan yang mendorong pada pemecahan masalah yang terkait hubungannya dengan manusia. Perubahan sosial, pemberdayaan, pembebasan dan perbaikan masyarakat. Dengan menggunakan teori perilaku masyarakat serta sistem sosial maka dalam melakukan intervensi dapat ditemukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip hak asasi manusia dan keadilan menjadi sangat penting dalam peranan bagi seorang

¹⁶. Dwi Heru Sukoco, *Profesi pekerjaan Sosial*....., hlm.07.

pekerja sosial.¹⁷ Dalam pengertian di atas bahwa dapat diketahui bahwa pekerja sosial adalah pekerja yang berusaha membantu kelompok masyarakat dalam memecahkan masalah, meningkatkan kapasitas atau pemberdayaan sumberdaya manusia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial yang didasari pada kegiatan profesional untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Fungsi Pekerja Sosial

Fungsi pekerja sosial menurut Leonora Serafika De Gusman dinyatakan pada fungsi dari seorang peran pekerja sosial, yaitu Fungsi yang lebih ditekankan pada pengembangan sumberdaya manusia dari kemampuan masyarakat untuk mengatasi, tantangan, kesulitan, dan tekanan dalam kehidupan.¹⁸

C. Peran Pekerja Sosial

Menurut Perso, Jorgenson dan Hernandes, ada beberapa peran dari pekerja sosial.¹⁹ Lima peran yang dapat dilakukan pekerja sosial diantaranya;

1) Fasilitator

Peran sebagai fasilitator disebut dengan pemungkin. Menurut Barker fasilitator adalah sebuah tanggung jawab untuk membantu masyarakat agar mampu menangani tekanan situasional dan transaksional. Strategi-strategi khusus agar mencapai tujuan tersebut diantaranya memberikan harapan, penolakan ambivalen, pengakuan, pengaturan perasaan, mengidentifikasi, mendorong kekuatan personal

¹⁷. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Strategi pembangunan kesejahteraan sosial*, (Bndung : Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

¹⁸. Dwi Heru Sukoco , *Profesi Pekerja Sosial*....., hlm. 54.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 97.

dan aset-aset sosial, pemilihan masalah menjadi beberapa bagian agar mudah dipecahkan, serta pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2) Broker

Peranan broker dalam hal ini adalah mencakup pada hubungan masyarakat dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas dari barang dan pelayanan tersebut. Dalam melakukan pendampingan ada tiga prinsip dalam menjalankan peranannya sebagai broker yaitu 1) Mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemanusiaan yang tepat 2) Menghubungkan konsumen dengan sumber secara teratur 3) mengevaluasi efektifitas sumber daya alam dalam kaitannya dengan masyarakat.²⁰

3) Mediator

Peran pekerja sosial sebagai penengah apabila terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik. Upaya yang dilakukan sebagai mediator mengarah pada *win-win solution*. Menurut Compton dan Galaway ada beberapa ketrampilan yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai mediator yaitu a) Mencari kesamaan antara pihak yang berkonflik. b) Membantu setiap pihak supaya mengakui legitimasi dari pihak lain. c) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama. d) Menghindari keadaan yang mengarah pada munculnya kondisi menang

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 98.

kalah. e) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendorong kepada masyarakat supaya dapat bicara satu sama lainnya.²¹

4) Pembela

Peran pembela dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus dan advokasi kausal. advokasi kasus dilakukan jika pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap individu dari masyarakat. Sedangkan advokasi kausal dilakukan dalam sekelompok anggota masyarakat.

5) Pelindung

Dalam melakukan perlindungan pekerja sosial bertindak berdasarkan pada kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Tugas dari pelindung meliputi a) penentuan siapa masyarakat dari pekerja sosial yang utama. b) Menjamin tindakan yang dilakukan sesuai dengan proses perlindungan. c) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh pada tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab, legas dan rasional praktek pekerja sosial.²²

2. Pengembangan Sumberdaya Manusia

a. Pengertian Sumberdaya Manusia

Secara bahasa sumber berarti tempat keluar. Sedangkan daya berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. apabila dua kata tersebut digabungkan, maka sumberdaya mempunyai arti bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Sedangkan sumberdaya manusia berarti segenap manusia yang dapat diaktualisasikan untuk melakukan sesuatu dalam rangka pemenuhan

²¹ Zulkipli Lessy, *Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam : Peran Pekerja Sosial Dalam Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Sosial Islam, Perspektif Normatif dan Praktis*, (Yogyakarta : PMI Fk.Dakwah UIN Sunan Kalijaga dan IISEP CIDA, 2007), hlm.115.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 99.

kebutuhan hidupnya.²³ Pengembangan sumberdaya manusia secara mikro di dalam suatu organisasi adalah usaha untuk mencapai hasil yang optimal.²⁴ Maka untuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang diperlukan sebuah ketrampilan yang berkualitas.

Sedangkan kualitas mutu dan ketrampilan sumberdaya manusia menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan nonfisik.²⁵ Adapun untuk meningkatkan kualitas fisik dengan pengupayaan program peningkatan kesehatan. Sementara aspek nonfisik dapat dipenuhi dengan program pendidikan, pelatihan dan pembinaan. Maka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peneliti mengambil pada fokus nonfisik, karena bagi masyarakat untuk menjadikan manusia tersebut unggul sehingga dapat megaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui program pelatihan ketrampilan.

b. Kopetensi Sumberdaya Manusia

Menurut kamus lengkap dari Prof. Drs. S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, kopetensi berarti kemampuan dan kecakapan. Kopetensi ini meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, kedisiplinan, pelatihan, pengembangan dan motivasi. Kopetensi tersebut diantaranya :

1) Peningkatan Pengetahuan (pendidikan)

Adanya perencanaan sebuah pelatihan yang jelas dan mutu disuatu instansi maupun organisasi tertentu akan memacu seseorang untuk selalu meningkatkan pengetahuannya melalui program pelatihan-pelatihan ketrampilan yang diadakan. Peningkatan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.867.

²⁴ Ibid, hlm.9.

²⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumberdaya Manusia* , (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1998). Hlm.2.

pengetahuan ini dilakukan dengan cara sosialisai kepada para peserta seperti halnya pendidikan di sekolah yaitu dengan menjelaskan, mendengarkan, mencatat dan praktek secara langsung.

2) Peningkatan Ketrampilan

Ada pendapat umum yang menyatakan bahwa sedikitnya terdapat tiga macam bidang ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan proses peningkatan mutu kualitas sumberdaya manusia, yakni *pertama*, adanya satu ketrampilan dasar. Ketrampilan dasar ini dilakukan seseorang dalam melakukan sebuah pelatihan. Hal ini sangat penting dilakukan supaya manusia dapat mengerti sebelum melaksanakan ketahap berikutnya. *Kedua*, ketrampilan dengan manusia. Ketrampilan ini merupakan yang didalamnya melibatkan langsung dengan orang yang satu dengan yang lainnya itu sendiri tanpa ada perantara dari manapun, sehingga pengetahuan ketrampilan yang didapat seseorang secara langsung. *Ketiga*, ketrampilan yang konseptual yaitu ketrampilan yang yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok-kelompok tertentu maupun organisasi peduli lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa pelatihan tertentu dengan melibatkan orang banyak.

3) Meningkatkan Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia karena merupakan salah satu cara untuk menjadikan pelatihan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

4) Pelatihan Pengembangan

Pelatihan ini didefinisikan sebagai salah satu usaha yang diselenggarakan dari sebuah organisasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan para peserta dalam sebuah pelatihan.²⁶

5) Motivasi

Merupakan istilah yang lebih umum, yang menunjukkan kepada proses gerakan itu, termasuk situasi yang mendorong yang timbul dalam diri individu seseorang terhadap tingkah laku yang ditimbulkan oleh situasi gerakan atau perbuatan.²⁷ Motivasi juga disebut dengan niat dan dorongan yang tumbuh dalam hati manusia yang menggerakkan untuk melaksanakan amal perbuatannya.

Untuk menjadikan seseorang dalam suatu pelatihan perlu adanya motivasi yang mendukung terhadap program yang dilaksanakan yaitu dengan memberikan pemenuhan kebutuhan berupa keamanan, kebutuhan akan pengetahuan dan kebutuhan akan kepuasan.²⁸ Maka peneliti dapat mengambil pengertian bahwa motivasi merupakan keharusan yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah pengembangan sumberdaya manusia terhadap suatu program pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau organisasi tertentu.

Dari berbagai komponen tersebut maka peneliti mengartikan bahwa pengembangan sumberdaya manusia mencakup beberapa komponen yang memiliki enam kebutuhan yaitu meliputi kebutuhan peningkatan

²⁶ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta : Grasindo Cet. ke 3, 2005), hlm. 244.

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Bandung : Angkasa, 1984), hlm.63.

²⁸ Uman Effendi dan Juhaya. S. Praja. *Psikologi*. (Bandung : Angkasa, hlm. 63.

pengetahuan, kebutuhan kedisiplinan, motivasi, pelatihan pengembangan dan kebutuhan akan ketrampilan.

2. Dampak

Dampak adalah sesuatu pengaruh kuat yang terjadi atau telah dilakukan yang dapat berakibat positif dan negatif.²⁹ Untuk melihat dampak dari segi positif dan negatif maka peneliti melakukan dengan cara evaluasi. Evaluasi adalah sebuah aktivitas yang dapat dipakai untuk menilai kinerja akhir dari satu intervensi, meningkatkan transparansi dan pertanggung-jugatan implementasinya serta menciptakan basis pengetahuan dan informasi bagi perencanaan intervensi di masa mendatang. Secara umum terdapat lima indikator yang digunakan peneliti dalam proses evaluasi, yaitu:

1. Efektivitas, mengukur seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dalam intervensi telah dicapai atau mampu dicapai
2. Efisiensi, mengukur tingkat produktivitas intervensi yaitu seberapa jauh output yang dihasilkan dari intervensi tersebut setara dengan input yang telah digunakan
3. Relevansi, menakar seberapa jauh tingkat validitas tujuan yang telah ditetapkan dalam intervensi dengan kebutuhan dan prioritas dari penerima manfaat yang disasar.
4. Dampak, menakar semua perubahan positif dan negatif, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang timbul akibat intervensi yang dilakukan dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan, baik oleh penerima manfaat yang disasar maupun kelompok masyarakat lainnya

²⁹ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 144.

5. Keberlanjutan, mengukur seberapa jauh dampak positif tersebut akan terus berlangsung tanpa adanya intervensi lebih lanjut

Sebelum menjelaskan bagaimana pendekatan kritis, lebih baik dipahami terlebih dahulu pendekatan tradisional dan partisipatif. Pendekatan tradisional adalah pendekatan dalam evaluasi yang dilakukan atau diinisiasi oleh pemerintah/pengelola program/lembaga donor dengan menugaskan individu/kelompok ahli yang berperan sebagai evaluator independen. Dalam pendekatan ini, warga/komunitas serta para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program hanya berperan sebagai obyek pemberi informasi. Tujuan, cakupan serta jenis informasi yang dibutuhkan ditentukan tanpa persetujuan dan peran serta masyarakat.

Sebaliknya, dalam pendekatan partisipatif, semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan/program terlibat secara aktif dan ikut menentukan jalannya tiap tahap dalam evaluasi. Pengelola program dan penerima manfaat serta para pihak yang lain ikut menentukan tujuan evaluasi, rancangan dan jenis informasi yang dibutuhkan, pengumpulan informasi, bahkan sampai analisis dan penyusunan rekomendasi maupun hasil.

Adanya dua pendekatan tersebut telah menimbulkan sebuah dikotomi yang mempengaruhi metode evaluasi yang digunakan. Padahal dalam evaluasi keduanya dibutuhkan, sehingga pembagian ekstrim yang dikotomi tersebut dianggap menyesatkan karena telah mengabaikan pentingnya proses yang berkaitan dengan dialog dialektis antara analisis ekspert dan masyarakat dalam membaca situasi dan menilai sebuah program. Pendekatan yang mendialogkan partisipasi masyarakat dan orang luar (ahli) ini disebut sebagai evaluasi dalam perspektif kritis.

Dalam perspektif ini pendekatan partisipatoris akan dimodifikasi agar memungkinkan dialog itu terjadi. Sebaliknya kerangka pendekatan evaluasi dan analisis evaluator juga perlu disesuaikan agar dialog tersebut dapat terwujud. Dengan kata lain perspektif kritis menawarkan sebuah metode yang memungkinkan berbagai penilaian itu muncul dari para pemanfaat program itu sendiri berikut berbagai stakeholder relevan lainnya. Meskipun dari dialog tersebut evaluator dari luarlah yang menulis laporan evaluasinya.

Dari uraian tersebut maka peneliti secara sederhana menguraikan prinsip evaluasi dalam perspektif kritis adalah sebagai berikut :

- a) Multi perspektif harus mampu menangkap dan mengartikulasikan pandangan semua pemangku kepentingan yang terlibat atau terkena dampak
- b) Komprehensif, harus mampu mengidentifikasi semua dampak sosial yang ditimbulkan serta pemangku kepentingan yang merasakan dampak tersebut
- c) Partisipatif, harus melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pengumpulan informasi
- d) Interaktif harus melibatkan proses dialog dan interaksi dua arah antara evaluator dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi
- e) Pengungkapan ke publik, harus menyebarluaskan hasil dan temuan-temuan audit sosial kepada seluruh pemangku kepentingan dan publik secara luas.

Selain itu prinsip yang tidak kalah penting adalah evaluasi kritis tidak terjebak pada evaluasi mengenai efektifitas, efisiensi tujuan. Dengan kata lain evaluasi kritis melampaui ruang lingkup tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan oleh program itu sendiri. Hal ini karena dalam konteks program atau proyek yang berdimensi kompleks, jika evaluasi hanya menitikberatkan sasarannya pada dimensi yang telah dirumuskan dari gejala tersebut. Bisa jadi faktor penyebabnya berada di luar ruang lingkup program. Bisa jadi dimensi yang tidak dilihat/diurus oleh program tersebut merupakan faktor penting, bahkan bisa jadi faktor utama, yang telah menyebabkan timbul, berkembang dan terpeliharanya gejala tersebut.

Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan evaluasi kritis yang dilakukan bertolak dari pendapat bahwa hal-hal yang tidak diperhatikan di dalam program Unit Pengelola Sosial, jangankan merupakan dimensi yang terlalu signifikan untuk diabaikan oleh sebuah program serius, luas, pasif dan mahal yang bertujuan untuk mengganggu kemiskinan.

3. Membangun sebuah kerelawanan sosial

Kerelawanan merupakan sebuah sumbangan masyarakat bagi pengembangan pembangunan masyarakat sipil. Relawan memiliki peranan penting dalam pembangunan, dalam prosesnya menanamkan sebuah prinsip membangun masyarakat dari dalam membutuhkan sebuah pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Proses pembangunan dari dalam tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut yang merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya.

4. Membangun manusia sejati berjiwa sosial.³⁰

Apa yang disebut dengan manusia? Apa bedanya yang paling hakiki antara manusia dengan hewan ?. tidak seperti hewan manusia memiliki akal yang sehat, hati nurani dan pilihan bebas. Manusia bukan semata-mata makhluk intelektual yang hanya menggunakan akalnya saja , bukan hanya sekedar jasmaniah semata, bukan hanya memiliki hati nurani atau jiwa saja. Manusia mempunyai panduan yang harmonis antara akal sehat , hati nurani, jasmani dan jiwa sehubungan dalam menjalankan dan menemukan kemanusiaannya bisa bersikap, berbuat, berperilaku berdasarkan pilihannya yang berpangkal pada hati nurani dan akal yang sehat. Nurani pada dasarnya adalah seperangkat nilai yang merupakan hukum moral di dalam diri manusia mengenai benar dan salah. Orang menggunakan nuraninya adalah orang yang mengerti maknanya berkorban, keikhlasan, persahabatan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, keadilan, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain dan nilai positif lainnya. Manusia yang seperti inilah yang sudah bisa menemukan “makna hidup” (*the meaning of life*) sebagai manusia sejati.

5. Memberdayakan Manusia Sejati Berjiwakan Sosial

Membangun yang memberdayakan seharusnya pembangunan yang bisa memproduksi kesadaran kritis agar setiap orang berdaya untuk menjadi manusia yang sejati artinya manusia yang merdeka yang membebaskan manusia dari poses-proses dehumanisasi. Pemberdayaan dalam hal ini haruslah menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengamalkan nilai-nilai universal berupa sikap dan perilaku dalam mengatasi berbagai persoalan manusia dalam segala aspeknya baik ekonomi sosial maupun politik.

³⁰ Marnia Nes. *Konsep PNPM-MP*, Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya).

Menurut Mahatma Ghandi³¹ bahwa dalam kehidupan manusia pertumbuhan dan perkembangan aspek material non material harus berjalan seimbang dan harmonis. Ada tiga golongan kesadaran manusia :

1. Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*), kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran lebih melihat faktor diluar manusia (*natural maupun supranatural*) sebagai penyebab ketidak berdayaan. kelompok yang mempunyai kesadaran ini menganggap persoalan yang terjadi dalam hidup termasuk kemiskinan terjadi secara alamiah karena nasib atau faktor-faktor supranatural.
2. Kesadaran Naif (*naival Consciousness*), keadaan yang di kategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat ‘*aspek manusia*’ menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini ‘*masalah etika*’ kreatifitas, dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisa mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘*salah*’ masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya untuk membangun.
3. Kesadaran Kritis (*critical Consciousness*), kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural lebih menghindari “*menyalahkan korban*” (orang miskin) dan lebih menganalisa untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta akibatnya pada keadaan masyarakat. Sedangkan struktur dan sistem politik diciptakan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan dan akses terhadap pengambilan keputusan.

³¹ *Tokoh Sorang Pejuang Keadilan dari India*

Masyarakat harus bisa menganalisa secara kritis dari faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan yang terjadi pada dirinya serta menjalankan kewajiban dan haknya sebagai manusia yang merdeka untuk menghilangkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Pembangunan kini bukan hanya berorientasi pada perkembangan ekonomi akan tetapi juga '*pembangunan pada manusia*'. Setiap manusia dikembangkan menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkualitas. Cita-cita selanjutnya adalah mendorong setiap individu untuk membangun kesalahan pribadi maupun sosial dan bercita-cita untuk menciptakan masyarakat madani yang mandiri, beradab, maju dan bermartabat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis ini dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Tailor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa

³² Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm.310

³³ Moeleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.3.

kata-kata tertulis dan lisan dari informan baik individu atau kelompok.³⁴ Dengan tujuan untuk mengungkap secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat masyarakat yang berada di Desa Potorono.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang di teliti.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

1. Didik Purwoko (Tim Faskel PNPM-MP wilayah Bantul 4)
2. Dekrit Budiono (Pengurus LKM Maju Sejahtera Desa Potorono)
3. Sukarni, Nung Hermini, dan Atik Mudawamah (Tim Pelaksana Unit Pengelola Sosial LKM Desa Potorono)
4. M. Dalhar D.W (Lurah Desa Potorono)
5. Subekti, Ponirah, dan Eni Setyowati (Salah satu peserta pelatihan)

b. Obyek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu mengetahui strategi penanggulangan masalah sosial yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono. Maka obyek penelitian ini adalah unit pengelola sosial pada LKM Maju Sejahtera.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Menurut Moleong sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya

³⁴ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985), hlm.63.

³⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.92.

adalah data tambahan seperti dokumen dan yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode.³⁶;

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara ini peneliti lakukan sebagai bentuk kajian silang yang bertujuan saling melengkapi, sebagai solusi atas minimnya data yang tersedia di LKM Maju Sejahtera Desa Potorono, serta kebuntuan dalam memperoleh data yang baru dan akurat. Selain itu metode ini digunakan untuk menggali obyektifitas data, atau verifikasi kebenaran data lebih mendalam, dan menghindari manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait adanya program tersebut, dan memperoleh tanggapan masyarakat secara langsung atas partisipasi keluarga miskin di Desa Potorono terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan yang belum ada datanya di LKM Maju Sejahtera Desa Potorono. Adapun sasarannya adalah masyarakat miskin baik perorangan, atau kelompok yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti yaitu anggota Unit Pengelola Sosial yang kebetulan berada di LKM saat penelitian berlangsung dan peserta pelatihan ketrampilan pada saat ke balai desa. Metode ini dilakukan secara langsung bertemu dengan informan baik di LKM, atau mendatangi kerumah warga. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan adalah dengan teknik internal, yakni peneliti melakukan sebagai berikut;

1. Peneliti bersikap netral, singkatnya yang dikerjakan sebatas pada bertanya dan mencatat.

³⁶ Ibid, hlm.4.

2. Peneliti merasa yakin dan optimis pada saat menghadapi informan untuk mendapatkan data yang di perlukan.
3. Peneliti berusaha menyesuaikan diri pada informan, baik dalam pemahaman sifat dan karakteristik informan yang bervariasi ataupun menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi.
4. Bersikap wajar, santai dan tanpa rahasia.
5. Pembicaraan melalui proses informal kekeluargaan.
6. Hal-hal tersebut di lakukan agar peneliti memperoleh kemudahan dalam proses pengumpulan data, kemudian data yang di peroleh di catat dalam catatan lapangan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian, yaitu buku-buku panduan, leaflet, buku laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban, serta dokumen umum keanggotaan LKM Maju Sejahtera. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi, dan menegaskan dokumen hasil wawancara.³⁷

c. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mendeskripsikan data yang faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam penelitian ini dipergunakan cara observasi partisipan yang artinya peneliti ikut terjun langsung dan aktif dengan subyek penelitian untuk mendapat informasi.

³⁷ Suharsini Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.202.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang tidak penting serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.³⁸ Tahapan-tahapannya adalah :

- a. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bukan deduktif tapi induktif menggunakan observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.
- b. Proses analisa dengan cara mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu mengambil kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan dinilai suatu kejadian khusus.³⁹ Artinya memaparkan proses terjadinya program PNPM-Mandiri secara keseluruhan kemudian kepada sub Unit Pengelola Sosial.
- c. Melakukan interpretasi dan membuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan secara analitis mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan yang di selenggarakan oleh SubUnit Pengelola Sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia dan dampaknya terhadap pelaksanaan pelatihan ketrampilan yang di selenggarakan di wilayah Desa Potorono Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

³⁸ *Ibid*, Hal.297.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Yogyakarta* : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990, Hal.42.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan mengenai peran pekerja sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia yang dikelola oleh Unit Pengelola Sosial serta dampaknya terhadap masyarakat yang menerima program yang dikelola proyek penanggulangan kemiskinan di Desa Potorono. Maka peran dari Unit Pengelola Sosial diantaranya :

1. Sebagai fasilitator peran dalam unit ini mampu melaksanakan upaya penanggulangan masalah sosial yang bersifat reaktif dan strategis. Program yang dilaksanakan dengan cara menerapkan pendekatan partisipatif melalui penguatan lembaga kemasyarakatan yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan.
2. Sebagai mediator unit ini dapat membantu masyarakat dalam proses pelaksanaan program kegiatan pelatihan ketrampilan. Bantuan yang diberikan yaitu dengan memfasilitasi segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan ketrampilan, tanpa ada perbedaan yang mencolok di antara para peserta pelatihan.
3. Peran pekerja sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia di Desa Potorono dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pendidikan melalui penguatan ketrampilan khusus. Unit Pengelola Sosial berusaha membantu masyarakat terutama warga miskin dalam memecahkan masalah pengangguran dan meningkatkan kapasitas masyarakat, melalui program pelatihan ketrampilan menjahit dan program pelatihan memasak kue.

Perbaikan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh Unit Pengelola Sosial yaitu belum dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai warga masyarakat dan keadilan sosial yang didasari pada kegiatan pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan pekerjaan yang baru. Maka dampak yang dapat dirasakan dari peserta pelatihan ketrampilan tersebut setelah acara selesai diantaranya :

1. Bahwa peran pekerja sosial dalam Unit Pengelola Sosial untuk meningkatkan sumberdaya manusia masih sangat minim, karena penyelesaian masalahnya bukan pada akar penyebabnya, sehingga hasil yang didapat juga tidak seperti yang diharapkan.
2. Pemberian ketrampilan pada pelatihan yang diberikan, sebenarnya telah mampu dikerjakan oleh peserta, jadi tanpa dilatih mereka sudah bisa mengerjakannya.
3. Yang dibutuhkan peserta dalam pelatihan adalah cara pengelolaan dan pemasaran kepada para konsumen serta fasilitas tempat yang mendukung untuk membuka usaha baru seperti, kios-kios yang salah satunya digunakan untuk pemasaran kepada masyarakat.
4. Program yang diberikan dalam ketrampilan tidak berdampak pada munculnya usaha produktif baru yang tidak dapat menggantikan pekerjaan lamanya, meskipun dari hasil ketrampilan mereka ada pemesanan, tetapi hal tersebut tidak setiap hari ada.

Unit Pengelola Sosial Desa Potorono mempunyai dua program kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pelatihan menjahit dan pelatihan memasak kue. Kegiatan pelatihan di Unit Pengelola Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia khususnya warga yang tidak punya pekerjaan

tetap, sehingga dengan dimilikinya ketrampilan maka akan muncul berbagai usaha produktif. Namun program tersebut tidak efektif dan efisien, karena berdasarkan dari alokasi anggaran dari unit ini, sebenarnya anggaran yang digunakan cukup kecil, sehingga meskipun demikian jalannya pelatihan tidak dapat berjalan dengan baik.

Pelatihan yang diberikan kurang efektif, misalkan dalam training pelatihan tersebut tidak semua peserta hadir dan pelaksanaannya juga bukan hari libur sehingga dalam acara pelatihan tidak banyak yang hadir sehingga kurang efisien. Dari uraian mengenai pelatihan menjahit dan memasak kue, sebenarnya peserta pelatihan tidak terlalu membutuhkan satu pelatihan menjahit dan memasak kue karena peserta sudah tahu bagaimana cara menjahit dan memasak kue dengan baik, yang peserta inginkan adalah adanya lapangan pekerjaan yang rutin dan memasarkan hasil ketrampilannya kepada masyarakat atau konsumen.

B. Saran-Saran, Kritik dan Masukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan kepada Program PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada Unit Pengelola Sosial yang menangani masalah Sosial perlu diadakannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan bekerja sama dengan instansi atau lembaga tertentu untuk saling bekerja sama dalam menangani masalah sosial yang terjadi.
2. Perlu adanya pendidik atau pendampingan khusus kepada masyarakat terhadap proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya diprioritaskan kepada masalah sosial dan bukan masalah lingkungan yang di selesaikan.

4. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin sebaiknya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan atau dapat juga diberikan kepada para peserta didik pelatihan setelah diadakan training sebelumnya.
5. Selalu diadakannya program sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan tertentu yang berhubungan dengan masalah sosial.
6. Membantu dalam pemasaran hasil ketrampilannya kepada masyarakat sekitar atau konsumen.
7. Hendaknya Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan mekanisme proses pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta; P.N Balai Pustaka, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta; U.I. 1996.
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* Jakarta; Rajawali Press, 1984).
- Marnia Nes, *Konsep PNPM-MP* Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2007.
- Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta; English, 1991.
- Meylani Yo, *Penerapan Pendekatan Sistem Dalam Relasi Tanggung Jawab Sosial Korporat Dengan Stakeholders di Indonesia, Makalah Dalam Seminar.*”
Dirkursus Relasi Masyarakat,
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Strategi pembanguna kesejahteraan social*, Bndung ; Refika Aditama, 2005 .
- Jusman Iskandar (penyunting), *Filsafat Dan Etika Pekerja Sosial*, Bandung ; Koperasi STKS, 1995.
- Zulkipli Lessy, *Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam, Peran Pekerja Sosial Dalam Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Sosial Islam, Perspektif Normatif dan Praktis*, Yogyakarta : PMI Fk.Dakwah UIN Sunan Kalijaga dan IISEP CIDA, 2007 .
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta; Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta; Rajawali, 1986.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka

- Cipta, 1990.
- Oscar Lewis, dalam Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta; Sinar Harapan, 1994.
- Jalaluddin rahmat, *Islam Alternative*, Bandung; Mizan, cet.III 1989.
- Dorojatun kuntjoro jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung; Mizan 1994.
- Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative*.1994.
- Ginjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta; CIDES,1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Soekidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumberdaya Manusia*, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1998.
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta : Grasindo Cet. ke 3, 2005.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Bandung : Angkasa, 1984.
- Uman Effendi dan Juhaya. S. Praja. *Psikologi*.Bandung : Angkasa.
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 199.

Refrensi Koran, Jurnal, Dokumen, Perkuliahan, dan Internet

- Sukron Munjazi, Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di Kota Yogyakarta, Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Skripsi Fakultas Dakwah 2009.
- Aziz Muslim,"*Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat*,"*Jurnal Pengembangan Masyarakat*." Vol 5:1 Yogyakarta; Jurusan PMI, Januari 2007.
- Ade Zulkhan Suparman, *Peran Badan Usaha Kredit Pedesaan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah 2007.

Dokumen laporan tahunan dan LPJ LKM Maju Sejahtera Tahun 2008

Dokumen buku “ *Membangun LKM*” siklus kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan, jilid

III diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Desember 2007.

Ade Jalil Hermawan, *Dakwah dan pengentasan kemiskinan*, Studi atas pemikiran

KH. MA. Sahal mahfudz, Skripsi Fakultas Dakwah 2001.

Sumber pemerintahan Desa Potorno “Profil Desa” 2009.

Bisnis dan Media” Dalam Rangka Dies Natalis Fisip UAJY XVI, 8 Juni 2007.

Perkembangan jumlah penduduk miskin yang ditetapkan oleh pada BPS (*Badan Pusat Statistik*). 13 Maret 2008.

Tafsir Ayat-Ayat Kesejahteraan Sosial, dalam perkuliahan yang disampaikan oleh

Waryono Abadul Ghofur, Dosen PMI Fakultas Dakwah UIN

Sunan Kajjaga Yogyakarta.

http://www.sunandars.blogspot.com/2009/02/peranan-pekerja-sosial-dalam_20.html

<http://www.pnpm.undp.or.id/mdg/targets.asp> 12 Januari 2010